

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM YOUTH EDUCATION AND EMPLOYABILITY SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Elisha Rambu Nedi

NPP. 32.0646

*Asdaf Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : elisharambu@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The problem underlying this research is the open unemployment rate in West Sumba which shows a worrying trend, especially among young people. The latest data from BPS noted that in 2022, the unemployment rate in West Sumba reached 7.5%, which is higher than the national average of 5.86%. This figure reflects the difficulty in creating adequate jobs to meet the needs of the increasing workforce. Various efforts to reduce unemployment have been made by the government, such as job training programs, increasing access to education, and creating jobs through investment. However, the results are often not as expected. Many programs are not well coordinated, so their effectiveness is limited. This causes a lack of synergy between industry needs and the education provided. Without effective collaboration between stakeholders including the government, private sector, educational institutions and the community, these programs will not achieve maximum results.* **Purpose:** *To find out and analyze how Collaborative Governance in the Youth Education and Employability program is an effort to reduce unemployment in West Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province.* **Method:** *This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation. Data collection techniques are carried out through interviews with 6 informants.* **Results/Findings:** *The results of the study indicate that collaboration has been running quite well, which can be seen from the success indicators, there are 14 successful indicators, namely indicators of resource conditions and different stakeholder powers, incentives owned by stakeholders to collaborate, history of conflict between stakeholders in the past, inclusive participation, discussion forums, transparency of the process, adequate management of the collaboration process, management of the ability to implement technical credibility, ensuring collaboration is empowered to make credible decisions and convince all actors, face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and interim results. One indicator that has not been successful is clear basic regulations. Researchers found other things that cause high unemployment in West Sumba Regency, namely the gap in education and skills and the imperfection of the labor market.* **Conclusion:** *The collaboration process has shown quite good results although it still requires further improvement and enhancement in the four dimensions of collaboration.*

*Keywords: Collaborative governance, Youth Education and Employability, Unemployment, local*

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Sumba Barat menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, terutama di kalangan pemuda. Data terbaru dari BPS mencatat bahwa pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Sumba Barat mencapai 7,5%, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,86%. Angka ini mencerminkan kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang terus meningkat. Berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran telah dilakukan oleh pemerintah, seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja melalui investasi. Namun, hasilnya seringkali tidak sebanding dengan harapan. Banyak program yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga efektivitasnya terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya sinergi antara kebutuhan industri dan pendidikan yang diberikan. Tanpa adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan dan masyarakat, program-program tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal. **Tujuan:** Mengetahui dan menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* dalam program *Youth Education and Employability* sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 6 informan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan cukup baik yang dapat dilihat pada indikator keberhasilannya terdapat 14 indikator yang berhasil yaitu indikator kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, riwayat konflik antar pemangku kepentingan di masa lalu, partisipasi inklusif, forum diskusi, transparansi proses, manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil sementara. Adapun satu indikator yang belum berhasil adalah peraturan dasar yang jelas. Peneliti menemukan hal lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat yaitu adanya faktor kesenjangan pendidikan dan keterampilan serta tidak sempurnanya pasar tenaga kerja. **Kesimpulan:** Proses kolaborasi telah menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut dalam empat dimensi kolaborasi

**Kata Kunci:** *Collaborative governance, Youth Education and Employability*, Pengangguran, lokal

# **I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas dan kesehatan ekonomi suatu negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2024 sebesar 4,82 persen, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, tantangan masih nyata terutama dalam kelompok usia muda (15–24 tahun) yang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Di tingkat regional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang menghadapi masalah pengangguran yang cukup kompleks. Berdasarkan data BPS (2024), TPT di NTT pada Agustus 2023 tercatat sebesar 3,14 persen dan meningkat menjadi 3,17 persen pada Februari 2024. Tingkat pengangguran yang fluktuatif ini menggambarkan dinamika pasar kerja di provinsi tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan, dan minimnya diversifikasi sektor ekonomi. Hanya sekitar 19 persen angkatan kerja di NTT yang memiliki pendidikan tinggi, sementara mayoritas masih bergantung pada pendidikan dasar dan menengah (BPS, 2022).

Salah satu daerah di NTT yang menunjukkan tingkat pengangguran relatif tinggi adalah Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan data BPS (2022), tingkat pengangguran di kabupaten ini mencapai 7,5 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional pada tahun yang sama yaitu 5,86 persen. Perekonomian Sumba Barat yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan—yang cenderung tidak stabil—membatasi penciptaan lapangan kerja yang produktif. Sekitar 60 persen penduduk Sumba Barat bekerja di sektor pertanian, namun sektor ini sering kali tidak memberikan penghasilan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur ekonomi dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Hanya sekitar 16 persen angkatan kerja di Sumba Barat yang menyanggah pendidikan tinggi, menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor-sektor yang menuntut keterampilan spesifik dan pendidikan formal. Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan sangat relevan untuk diterapkan guna menangani permasalahan pengangguran. Kajian mengenai collaborative governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan proses dialog yang intensif guna membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh keseimbangan kekuasaan, kepemimpinan yang fasilitatif, serta desain institusional yang mendukung, yang kesemuanya harus diperhatikan dalam merancang program pengembangan tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat (Ansell & Gash, 2008). Kerangka kerja integratif collaborative governance juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan dapat meningkatkan adaptasi kebijakan serta menghasilkan dampak positif yang lebih luas, terutama pada program pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk pemuda. Sistem pemerintahan yang polisentris, yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal hingga provinsi, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan kualitas kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks seperti pengangguran (Emerson et al., 2012; Newig & Fritsch, 2009).

Lebih jauh, tata kelola kolaboratif dalam konteks sosial-ekologis yang kompleks menggarisbawahi perlunya kerjasama berkelanjutan antar pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi bersama. Hal ini penting untuk wilayah seperti Kabupaten Sumba Barat yang memiliki tantangan struktural dan geografis yang unik, sehingga perlu pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal dan dinamika sosial budaya yang ada agar intervensi yang dilakukan efektif dan sesuai konteks (Bodin, 2017; Healey, 2003). Pendekatan perencanaan kolaboratif menekankan aspek proses dan kekuasaan dalam tata kelola berbasis kolaborasi, sehingga peran pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat dan kelompok pemuda, harus diutamakan dalam merancang program-program ketenagakerjaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperkuat keterlibatan dan akuntabilitas, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih berkelanjutan dan inklusif (Healey, 2003; Bingham et al., 2005). Selanjutnya, konsep metagovernance yang menekankan pentingnya pengelolaan jaringan kolaboratif secara strategis menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan program ketenagakerjaan dan pelatihan di Kabupaten Sumba Barat. Pengelola program perlu memiliki kompetensi kolaboratif tinggi agar mampu mengatasi tantangan fragmentasi dan konflik kepentingan, memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan adil (Sørensen & Torfing, 2009). Dengan memahami dinamika dan kerangka kerja collaborative governance tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat lebih efektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap kondisi lokal di Sumba Barat. Hal ini menjadi sangat penting agar program pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM yang digalakkan benar-benar mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil ( GAP Penelitian )**

Meskipun kajian mengenai *collaborative governance* telah banyak dikembangkan dan terbukti efektif dalam berbagai konteks pemerintahan dan tata kelola pembangunan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012), penerapan konsep ini dalam upaya penanggulangan pengangguran di daerah tertinggal seperti Kabupaten Sumba Barat masih sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa pengangguran di wilayah ini masih tinggi dan didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan rendah serta minim keterampilan teknis, yang membutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya terpaku pada sektor ekonomi primer, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif (BPS, 2022; 2024). Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji kerangka dan teori *collaborative governance* secara umum, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan dan lingkungan (Bodin, 2017; Healey, 2003), namun masih kurang memberikan gambaran aplikatif yang konkret mengenai bagaimana model kolaborasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam mengatasi masalah pengangguran pemuda di daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang kompleks dan terbatas seperti Sumba Barat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, terutama terkait strategi pelibatan multi-aktor yang mengintegrasikan aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, sebagian besar studi yang ada

cenderung menekankan pentingnya komunikasi dan kepemimpinan dalam proses kolaborasi (Newig & Fritsch, 2009; Sørensen & Torfing, 2009), namun belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam peran institusi lokal dan budaya setempat dalam memfasilitasi atau justru menghambat kolaborasi tersebut, padahal aspek ini sangat krusial untuk konteks daerah seperti Sumba Barat yang memiliki keragaman sosial dan norma adat yang kuat. Kesenjangan ini membuka ruang bagi penelitian yang mengintegrasikan dimensi kultural dan institusional dalam pengembangan model *collaborative governance* yang adaptif dan kontekstual. Lebih jauh, sebagian besar kajian mengenai tata kelola kolaboratif fokus pada peran pemerintah dan organisasi formal, sementara keterlibatan masyarakat terutama kelompok pemuda sebagai penerima manfaat dan pelaku aktif dalam program pengembangan ketenagakerjaan masih kurang tereksplorasi (Bingham et al., 2005). Padahal, pemberdayaan pemuda melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program merupakan kunci keberhasilan pengurangan pengangguran jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana penerapan model *collaborative governance* yang adaptif, inklusif, dan berbasis konteks lokal dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang tidak hanya mengatasi persoalan pengangguran, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tertinggal.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam upaya menekan angka pengangguran, khususnya melalui program *youth education and employability*, penerapan konsep *collaborative governance* menjadi sangat relevan dan strategis. *Collaborative governance* sendiri adalah sebuah model tata kelola yang melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program publik (Nurnawati et al., 2024). Model ini mendorong partisipasi aktif berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi masalah pengangguran dengan solusi yang lebih inklusif dan efektif. Mohr et al. (1996) menegaskan bahwa komunikasi kolaboratif yang efektif dapat menciptakan suasana saling mendukung dan memotivasi kepatuhan sukarela antar mitra kerja, yang pada konteks program *youth employability* berarti mendorong keterlibatan semua pihak dalam menciptakan peluang kerja dan pelatihan yang tepat sasaran. Namun, tingkat integrasi dan kontrol antar pihak berperan penting dalam keberhasilan komunikasi ini, di mana koordinasi yang optimal bisa meningkatkan kepuasan dan komitmen dalam implementasi program. Sementara itu, Sørensen. E & Torfing. J (2011) menekankan pentingnya inovasi kolaboratif di sektor publik yang mendorong sinergi antar berbagai aktor untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah. Program pendidikan dan peningkatan keterampilan pemuda sebagai upaya menekan pengangguran memerlukan inovasi dan kolaborasi yang mampu mengadaptasi perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja dan teknologi. Healey (1998) menyoroti bagaimana kapasitas kelembagaan dan budaya kebijakan lokal yang terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung pendekatan kolaboratif. Hal ini penting agar program *youth employability* dapat beroperasi secara efektif dalam konteks lokal yang

unik, melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan memperkuat jaringan sosial sebagai modal institusional untuk pengembangan berkelanjutan. Dalam konteks inovasi publik, Hartley et al. (2013) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai strategi inovasi menempatkan keterlibatan multi-aktor sebagai inti dari keberhasilan program, dibandingkan hanya mengandalkan pasar atau kewirausahaan organisasi semata. Oleh karena itu, program pelatihan kerja untuk pemuda harus melibatkan berbagai pihak secara aktif agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. Lockwood (2010) memberikan kerangka kerja prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini mutlak diterapkan dalam tata kelola program *youth education and employability* agar tercipta kepercayaan dan dukungan luas dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Dari sisi praktis, Imperial (2005) mencontohkan bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya dan program lintas organisasi dapat meningkatkan kapasitas pemecahan masalah yang tersebar luas. Hal ini relevan dalam konteks mengatasi pengangguran yang merupakan masalah multidimensional, membutuhkan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Perkembangan teknologi juga menjadi aspek penting dalam transformasi tata kelola program publik. Rehm et al. (2014) dan Del Río Castro et al. (2021) menguraikan bagaimana digitalisasi dan teknologi seperti *digital twin city* dan big data dapat memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan program, termasuk dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Newman et al. (2004) menegaskan bahwa partisipasi publik yang aktif dalam forum deliberatif mendukung terwujudnya *collaborative governance*. Keterlibatan pemuda dan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan program *youth employability* penting agar program benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu menciptakan peluang kerja nyata. Pisano (1991) membahas berbagai model tata kelola inovasi dalam industri, termasuk bentuk kolaborasi yang dapat mengoptimalkan pengembangan teknologi dan distribusi, yang dapat diadaptasi dalam konteks pelatihan keterampilan bagi pemuda agar sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam kajian *collaborative governance* dengan mengaplikasikannya pada konteks program pendidikan dan pemberdayaan pemuda (*Youth Education and Employability*) sebagai strategi konkret untuk menekan angka pengangguran. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah banyak membahas konsep, model, dan implementasi *collaborative governance* dalam sektor publik dan tata kelola (Mohr et al., 1996; Sørensen, E & Torfing, J 2011; Healey, 1998; Hartley et al., 2013; Imperial, 2005; Nurnawati et al., 2024), serta inovasi kolaboratif di berbagai bidang seperti perencanaan kota, pelayanan publik, dan manajemen sumber daya, penelitian terkait pemanfaatan *collaborative governance* dalam konteks pemberdayaan pemuda guna menekan pengangguran masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi. Berbeda dengan studi Nurnawati et al. (2024) yang meneliti governance kolaboratif dalam pelayanan publik di Mal Pelayanan Kota Banda Aceh, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana kolaborasi multi-pihak—melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan,

sektor swasta, dan komunitas—dapat secara sinergis mengembangkan program pendidikan dan keterampilan kerja yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan peluang kerja pemuda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas mekanisme *collaborative governance* dari sisi kebijakan dan praktik, tetapi juga menilai dampaknya terhadap pengurangan pengangguran, yang merupakan isu strategis pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini turut mengintegrasikan pemahaman dari literatur internasional terkait inovasi kolaboratif (Sørensen & Torfing, 2011; Hartley et al., 2013), tata kelola kapasitas kelembagaan (Healey, 1998), serta peran komunikasi kolaboratif dalam meningkatkan koordinasi dan komitmen stakeholder (Mohr et al., 1996), guna merumuskan model implementasi program yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengisi gap literatur mengenai bagaimana kolaborasi multi-aktor dalam konteks pemberdayaan ekonomi pemuda dapat dirancang dan dioperasionalkan secara efektif untuk mencapai hasil nyata. Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus aplikatif *collaborative governance* untuk pengembangan program pemberdayaan pemuda sebagai solusi pengangguran, yang dikaji secara komprehensif dari aspek proses kolaborasi, inovasi, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi, sekaligus memperkaya kajian tata kelola kolaboratif yang selama ini lebih banyak terfokus pada sektor pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* dalam program *Youth Education and Employability* sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor determinan dalam program *Youth Education and Employability* sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur .

## **II METODE**

Penelitian ini menggunakan model teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan konseptual utama. Model ini dipilih karena menekankan tiga faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), dan kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership). Ketiga aspek tersebut secara dinamis berinteraksi dalam membentuk suatu sistem kolaboratif yang efektif. Pemilihan teori ini didasarkan pada relevansinya dalam menggambarkan kompleksitas proses tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan peran berbeda, khususnya dalam konteks pelaksanaan program pendidikan dan pemberdayaan pemuda untuk menekan angka pengangguran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks aslinya, mengingat dinamika sosial terkait pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan pemuda tidak dapat sepenuhnya diukur hanya dengan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019).

Penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yakni wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber akademis yang relevan (Simangunsong, 2017). Penelitian dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini melibatkan 12 informan yang berasal dari berbagai latar belakang terkait program Youth Education and Employability di Kabupaten Sumba Barat. Informan terdiri dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Manager Stimulant Institute mitra Save The Children, dua peserta program, dua pengajar/pelatih, seorang mentor desa, dan seorang pelaku usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat ditetapkan sebagai informan kunci karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan program secara keseluruhan sehingga mampu memberikan informasi yang paling komprehensif dan mendalam.

### **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Collaborative Governance dalam Program Youth Education and Employability Sebagai Upaya Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Pada penelitian Collaborative Governance dalam program Youth and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nus Tenggara Timur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash yang mencakup empat dimensi: (1) Kondisi Awal, (2) Desain Kelembagaan, (3) Kepemimpinan Fasilitatif, (4) Proses Kolaboratif, (Ansell and Gash, 2008). Keempat dimensi ini menjadi indikator utama dalam melihat sejauh mana proses kolaborasi dalam program Youth Education and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan dimensi yang telah diuraikan tersebut maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan yang berpartisipasi dalam rangka proses kolaborasi dalam program Youth Education and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. yang dikaitkan dengan menggunakan teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Kondisi Awal**

Kondisi awal sebagai analisis suatu kondisi terjadinya kolaborasi dimana latar belakang dari setiap pemangku kepentingan yang berbeda yang dapat menghalangi atau memfasilitasi terjadinya suatu kolaborasi. Proses kolaborasi pada dimensi kondisi awal membutuhkan tiga indikator yaitu kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan riwayat konflik atau kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu. Berdasarkan penjelasan dari informan mengenai kondisi antar sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda membuat peneliti memahami

bahwa adanya perbedaan kekuasaan pemangku kepentingan ini justru mendorong terjadinya kolaborasi yang efektif dengan menunjukkan adanya sikap saling mengisi satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dari kolaborasi ini. Hal ini sejalan dengan teori Ansell and Gash (2008) dimana Collaborative Governance yang efektif membutuhkan strategi dalam memberdayakan pemangku kepentingan yang kurang beruntung. Sehingga indikator kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda dikatakan berhasil dalam mencapai kolaborasi yang efektif. Dari penjelasan informan ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi pada masa lalu sudah terorganisir dengan baik. Artinya, kolaborasi di masa lalu sudah berlangsung baik sehingga adanya kepercayaan antar pemangku kepentingan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa indikator riwayat konflik atau kerjasama antar pemangku kepentingan dimasa lalu dinilai berhasil.

## **2. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan merupakan salah satu bagian dari kolaboratif. Desain kelembagaan berkaitan dengan protokol dasar dan aturan dasar yang jelas dan bersifat procedural dari proses kolaboratif. Desain kelembagaan yang tepat dan jelas dapat meyakinkan para pemangku kepentingan terkait regulasi yang dapat dipercaya dalam berkolaborasi. Oleh sebab itu membutuhkan sifat terbuka dan inklusif dari pemerintah. Dimensi desain kelembagaan memiliki empat indikator yaitu partisipasi inklusif, forum komunikasi, peraturan dasar yang jelas, dan transparansi proses. Kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian empat indikator collaborative governance dimensi desain kelembagaan dimana tiga indikator dianggap berhasil yaitu indikator partisipasi inklusif, forum komunikasi dan transparansi proses dimana ketiga indikator tersebut menunjukkan keberhasilan yaitu adanya partisipasi inklusif karena mampu mengajak pihak pemerintah, non pemerintah serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini, kemudian adanya forum komunikasi berupa rapat bulanan serta transparansi proses melalui website resmi dalam pemberian informasi terkait program yang dijalankan. Sementara indikator peraturan dasar yang jelas dianggap belum berhasil karena belum adanya peraturan dasar dari daerah yang mengatur mengenai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat maupun mengenai pelaksanaan kerjasama antar pihak swasta dengan pihak pemerintah. Sehingga, dimensi ini dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik.

## **3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu dimensi keberhasilan collaborative governance. Dimana peran pemimpin dalam berkolaborasi sangat dibutuhkan. Pemimpin kolaboratif disini sebagai pelayan proses (transformasi, pelayan, atau fasilitatif kepemimpinan) yang gaya kepemimpinannya ditandai dengan fokusnya pada promosi dan menjaga proses. Berdasarkan penjelasan dari informan, peneliti memahami bahwa indikator memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor sudah dijalankan dengan baik oleh pembina stimulant sebagai penanggung jawab dalam pengambilan keputusan pada saat rapat bulanan maupun rapat evaluasi hasil dalam menentukan upaya yang akan dilakukan dan dibantu dengan adanya saran, serta solusi dari instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dari para fasilitator sehingga dapat meyakinkan aktor

yang lain. Sehingga peneliti menilai indikator memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor sudah berhasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dimensi kepemimpinan fasilitatif dalam berkolaborasi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan pemimpin sudah memfasilitasi dengan baik dibuktikan dengan ketiga indikator dimensi kepemimpinan fasilitatif yang mendukung dalam berkolaborasi.

#### **4. Proses Kolaborasi**

Pada dimensi ini merupakan hal yang sangat penting dalam model collaborative governance dimana proses yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta menumbuhkan rasa saling percaya dan membangun komitmen dalam perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga terciptanya suatu visi misi dan kesamaan dalam tujuan berkolaborasi. Berdasarkan penjelasan informan dan data yang mendukung, dimensi proses kolaboratif dalam berkolaboratif dalam upaya menekan angka pengangguran menunjukkan pemimpin sudah memfasilitasi dengan baik dibuktikan dengan kelima indikator dimensi proses kolaboratif yang mendukung dalam berkolaborasi.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan **Collaborative Governance** dalam program *Youth Education and Employability* memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. Model tata kelola kolaboratif ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat, yang bersama-sama mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Temuan ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang mendorong partisipasi aktif multi-aktor untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi secara inklusif dan efektif (Nurnawati et al., 2024). Meskipun tingkat kesiapsiagaan masyarakat cukup baik, penelitian ini mengidentifikasi kendala utama berupa kurangnya peraturan dasar yang jelas sebagai landasan hukum dan panduan pelaksanaan program. Hal ini berpengaruh pada efektivitas koordinasi dan akuntabilitas antar pemangku kepentingan, sehingga menimbulkan hambatan dalam kolaborasi. Kondisi ini sesuai dengan temuan Mohr et al. (1996) yang menekankan pentingnya komunikasi dan integrasi peran antar mitra kerja untuk membangun komitmen dan kepuasan bersama dalam pelaksanaan program. Selain itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada inovasi kolaboratif yang mampu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Pendekatan ini menguatkan argumen Sørensen, E dan Torfing, J (2011) yang menyoroti peran inovasi dalam tata kelola sektor publik sebagai kunci efektivitas dan keberlanjutan program pemerintah. Hal ini juga didukung oleh Healey (1998) yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dan budaya kebijakan lokal yang terintegrasi dalam mendukung implementasi kolaboratif yang responsif terhadap konteks daerah. Prinsip good governance seperti legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keadilan menjadi sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan dukungan luas dari semua pemangku kepentingan. Temuan bahwa regulasi dan kebijakan formal masih lemah mengindikasikan perlunya penguatan regulasi agar prinsip-prinsip

ini dapat diterapkan secara konsisten (Lockwood, 2010). Selain itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dan komunitas lokal dapat meningkatkan kapasitas pemecahan masalah pengangguran yang bersifat kompleks dan multidimensional (Imperial, 2005). Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam mempercepat koordinasi, monitoring, dan penyebaran informasi program sehingga dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas pelaksanaan (Rehm et al., 2014; Del Río Castro et al., 2021).

Keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda sebagai target utama program, melalui mekanisme partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan peluang kerja nyata (Newman et al., 2004). Selanjutnya, model tata kelola inovasi yang menekankan kolaborasi dapat diadaptasi untuk mengoptimalkan pengembangan keterampilan dan distribusi peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja (Pisano, 1991). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program *Youth Education and Employability* sangat bergantung pada sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, regulasi yang jelas, inovasi yang adaptif, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan memperkuat efektivitas program dalam menekan angka pengangguran pemuda secara berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat.

### **3.3. Diskusi Topik Menarik Lainnya**

Selain peran sentral collaborative governance dalam program *Youth Education and Employability*, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan dan peluang penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu tantangan utama adalah **fragmentasi koordinasi antar pemangku kepentingan** yang disebabkan oleh kurangnya struktur regulasi yang mengikat secara formal. Ketidakharmonisan peran dan kewenangan antara lembaga sering kali menimbulkan tumpang tindih fungsi serta kebingungan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tanpa adanya payung hukum yang jelas, kolaborasi rentan mengalami inefisiensi dan konflik internal (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, memperjelas peran dan tanggung jawab melalui peraturan dan nota kesepahaman menjadi prasyarat penting untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program. Di sisi lain, tantangan teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola program dan teknologi informasi juga memengaruhi kualitas pelaksanaan. Kapasitas institusi lokal yang masih rendah dalam hal pengelolaan data dan monitoring program menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi sebagai alat penguat kolaborasi (Rehm et al., 2014). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan mendesak agar pemangku kepentingan mampu beradaptasi dengan dinamika dan tuntutan program. Peluang besar dalam program ini terletak pada semakin meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi pengangguran. Keterlibatan multi-aktor yang beragam membuka ruang bagi inovasi solusi yang lebih kreatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan

lokal (Sørensen & Torfing, 2011). Pendekatan partisipatif yang melibatkan pemuda secara langsung dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti pelatihan serta aktif mencari peluang kerja. Teknologi digital juga menghadirkan peluang transformasi tata kelola program yang lebih efisien dan transparan. Pemanfaatan platform digital untuk koordinasi, komunikasi, serta evaluasi program memungkinkan pengumpulan data real-time dan pelaporan yang lebih akurat, sehingga memudahkan penyesuaian kebijakan secara cepat dan responsif (Del Río Castro et al., 2021). Dengan menggabungkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi, program collaborative governance memiliki potensi untuk menjadi model inovatif dalam mengatasi pengangguran pemuda secara berkelanjutan. Hal ini juga dapat memperkuat sinergi antar sektor serta menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi di daerah.

#### **IV KESIMPULAN**

*Collaborative Governance dalam Program Youth Education and Employability* sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat sudah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dari penelitian yang mengacu pada indikator dan dimensi yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008). Berdasarkan penelitian dari 15 indikator dalam empat dimensi collaborative governance dalam program youth education and employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat terdapat 14 indikator yang berhasil yaitu kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, riwayat konflik antar pemangku kepentingan di masa lalu, partisipasi inklusif, forum diskusi, transparansi proses, manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil sementara. Adapun indikator yang belum berhasil yaitu peraturan dasar yang jelas. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Sumba Barat khususnya di Stimulant dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait program Youth Education and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat terdapat 14 faktor pendukung keberhasilan program tersebut antara lain kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, riwayat konflik antar pemangku kepentingan di masa lalu, partisipasi inklusif, forum diskusi, transparansi proses, manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil sementara. Adapun faktor penghambat keberhasilan program Youth Education and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat yaitu peraturan dasar yang jelas.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan yang Pertama, cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus pada Kabupaten Sumba Barat, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat sepenuhnya digeneralisasikan untuk daerah lain yang menghadapi tingginya angka pengangguran. Kedua, keterbatasan akses terhadap data primer, terutama data teknis dan administratif dari dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat serta media massa, yang terkadang tidak sepenuhnya terdokumentasi atau tersedia bagi publik. Ketiga, pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yang cenderung menghasilkan analisis interpretatif dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang dapat memberikan data statistik lebih konkret. Selain itu, jumlah dan keberagaman informan dalam wawancara dan observasi juga menjadi tantangan, karena tidak semua kelompok masyarakat terwakili secara maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian :** Penelitian ini memberikan wawasan mengenai Proses Collaborative Governance dalam program Youth Education and Employability sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi masih terdapat berbagai aspek yang dapat dikaji lebih lanjut. Kedepannya penelitian dapat berfokus pada Efektivitas, Peran, dan Penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kolaborasi untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat.

## V UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Pihak Save the Children, serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O’Leary, R. (2005). The new governance: Practices and processes for stakeholder and citizen participation in the work of government. *Public Administration Review*, 65(5), 547–558. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00482.x>
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352), eaan1114. <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Del Río Castro, G., González Fernández, M. C., & Uruburu Colsa, Á. (2021). Unleashing the convergence amid digitalization and sustainability towards pursuing the Sustainable Development Goals (SDGs): A holistic review. *Journal of Cleaner Production*, 280, 122204. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122204>

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2013). Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. *Public Administration Review*, 73(6), 821–830. <https://doi.org/10.1111/puar.12136>
- Healey, P. (1998). Building institutional capacity through collaborative approaches to urban planning. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 30(9), 1531–1546. <https://doi.org/10.1068/a301531>
- Healey, P. (2003). Collaborative planning in perspective. *Planning Theory*, 2(2), 101–123. <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Imperial, M. T. (2005). Using collaboration as a governance strategy. *Administration & Society*, 37(3), 281–320. <https://doi.org/10.1177/0095399705276111>
- Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, 91(3), 754–766. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.10.005>
- Mohr, J. J., Fisher, R. J., & Nevin, J. R. (1996). Collaborative communication in interfirm relationships: Moderating effects of integration and control. *Journal of Marketing*, 60(3), 103–115. <https://doi.org/10.1177/002224299606000307>
- Newig, J., & Fritsch, O. (2009). Environmental governance: Participatory, multi-level – and effective? *Environmental Policy and Governance*, 19(3), 197–214. <https://doi.org/10.1002/eet.509>
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public participation and collaborative governance. *Journal of Social Policy*, 33(2), 203–223. <https://doi.org/10.1017/S0047279403007499>
- Nurdin, A. (2019). *Pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia*. CV Cendekia Press.
- Nurnawati, E., Sabaruddin, S., & Nurrahman, A. (2024). Analisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(2), 197–213. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4832>
- Pisano, G. P. (1991). The governance of innovation: Vertical integration and collaborative arrangements in the biotechnology industry. *Research Policy*, 20(3), 237–249. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(91\)90054-T](https://doi.org/10.1016/0048-7333(91)90054-T)
- Rehm, J., Kailasapillai, S., Larsen, E., Rehm, M. X., Samokhvalov, A. V., Shield, K. D., Roerecke, M., & Lachenmeier, D. W. (2014). A systematic review of the epidemiology of unrecorded alcohol consumption and the chemical composition of unrecorded alcohol. *Addiction*, 109(6), 880–893. <https://doi.org/10.1111/add.12498>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik - legalistik - empirik - inovatif* (2nd ed.). Alfabeta.

Sørensen, E., & Torfing, J. (2009). Making governance networks effective and democratic through metagovernance. *Public Administration*, 87(2), 234–258. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x>

Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration & Society*, 43(8), 842–868. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x>.

### Sumber Website

Badan Pusat Statistik. (2022). *Keadaan angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota (persen), 2022–2023*. <https://ntt.bps.go.id/id/statisticstable/2/NTIyI=/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>

Badan Pusat Statistik. (2024, Mei 6). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,17 persen* [Siaran pers]. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1383/tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-3-17-persen.html>

Badan Pusat Statistik. (2024, Mei 6). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan* [Siaran pers]. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>

